

DAFTAR PUSTAKA

A. Literatur

- Hamzah, Andi. 2015. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Nazir, Moh. 2005. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Soekanto, Soerjono. 1984. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press).
- Moleong, J. Lexy. 1991. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Sunggu, Tumbur Ompu. 2012, *Keberadaan Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia*, Yogyakarta: Total Media.
- Darma, Surya. 2008. *Pengolahan dan Analisis Data Penelitian*. Jakarta: Direktorat Tenaga Kependidikan.
- Sugiono, 2015. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R dan D*. Bandung: Alfabeta.
- Mamuji, Sri dan Soerjono Soekanto. 1995. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT Rajawali.
- Muhadjir, Noeng. 1996. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (edisi iii). Yogyakarta: Rakesararin.
- Amirudin. 2014. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Sudarsono. 2009. *Kamus Hukum*. Bandung: Rineka Cipta.
- Kansil, C.S.T. dan Christine S.T. *Latihan Ujian Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Djaja, Ermansjah. 2009. *Memberantas Korupsi Bersama KPK Komisi Pemberantasan Korupsi Kajian Yuridis Normatif UU Nomor 31 Tahun 1999 junco UU Nomor 20 Tahun 2001 Versi UU Nomor 30 Tahun 2002*. Jakarta: Sinar Grafika.

Saleh, K. Wantjik. 1983. *Tindak Pidana Korupsi Dan Suap*. Jakarta: Balai Aksara.

Ali, Zainuddin. 2009. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

Susanti, Dyah Ochtorina dan A'an Efendi. 2015. *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Jakarta: Sinar Grafika.

Amiruddin dan Zainal Askin. 2016. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.

Ibrahim, Jonny. 2006. *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publising.

Nugroho, Hibnu. 2012. *Integralisasi Penyidikan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*. Jakarta: Media Prima Aksara.

Hadjon, M. Philipus dan Tatiek Sri Djatmiati, 2005, *Argumentasi Hukum*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Sunggono, Bambang. 2012. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.

B. Peraturan Perundang-undangan:

Indonesia, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

-----, Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (UU No. 31 Tahun 2014).

-----, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan saksi pelaku yang bekerjasama (*Justice Collaborator*) di dalam Tindak Pidana Tertentu (SEMA No. 4 Tahun 2011).

Peraturan Bersama No 11 Tahun 2011 Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Pelaku yang Bekerjasama

C. Jurnal

Semendawai, Abdul Haris. 2016. "*Penetapan Status Justice Collaborator Bagi Tersangka Atau Terdakwa Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*". Bandung: PJIH Padjajaran. Vol 3. No 3.

D. Website

Yusrianto Kadir, 30 Januari 2018, "*Tindak Pidana Korupsi Sebagai Extra Ordinary Crime*", tersedia di website <https://www.researchgate.net/publication/32278>.

Albert Aries, 02 Mei 2017, "*Perbedaan Saksi Mahkota Dengan Justice Collaborator*", tersedia di website <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/t58d33e6281239>.

Ahmad Sofian, 2018, "*Justice Collaborator dan Perlindungan Hukumnya*", terdapat dalam website <http://business-law.binus.ac.id/2018/02/14/justice-collaborator-dan-perlindungan-hukumnya/>.

Ase Satria, 2015, "*Definisi Peran dan Pengelompokan Peran Menurut Para Ahli*", tersedia di website <http://www.materibelajar.id/2016/01/definisi-peran-dan-pengelompokan-peran.html#>.

Si Manis, 2017, "*12 Pengertian Korupsi Menurut Para Ahli, Bentuk, Faktor Penyebab, Dampak Dan Cara Mengatasi Korupsi Lengkap*", tersedia di Website <https://www.pelajaran.id/2017/02/pengertian-korupsi-menurut-para-ahli-bentuk-faktor-penyebab-dampak-dan-cara-mengatasi-korupsi.html>.

KPK, 2014, "*Memahami Gratifikasi*", tersedia di Website <https://kpk.go.id/gratifikasi/BP/Gratifikasi.pdf>.

Letezia Tobing, 2013, "*Sistem Pembuktian Terbalik*" tersedia di Website <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt513ff99d6eedf/tentang-sistem-pembalikan-beban-pembuktian>.

Panjikeris, 2012, "*Gambaran Umum Audit Forensik*", tersedia di Website <https://panjikeris.wordpress.com/2012/04/24/audit-forensik/>.

Indonesia Corruption Watch, 2017, “*Investigasi Korupsi*”, tersedia di Website

<http://pukat.hukum.ugm.ac.id/upload/module/investigasikorupsi.pdf>.

Sudiman Sidabukke, 2017, “*Tinjauan Kewenangan Penyadapan Oleh KPK Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*”, sebagaimana tersedia di Website

<http://repository.ubaya.ac.id/133/1/Makalah%20Penyadapan%20KPK.pdf>.

Anti Corruption Clearing House, 2017, “*Ke Arah Pergeseran Beban Pembuktian*”, terdapat di Website

<https://acch.kpk.go.id/id/artikel/riset-publik/ke-arrah-pergeseran-beban-pembuktian>.

CR-25, 2018, “*Memahami Lagi Aspek Pengaturan dan Implementasi Justice Collaborator*” sebagaimana terdapat dalam Website

<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5a70404cac0bd/memahami-lagi-aspekpengaturandan-implementasi-justice-collaborator>.